



## **Keterlibatan Uni Eropa Dalam Mengatasi Perompakan di Somalia Tahun 2008-2015**

**Gracia Gerina L. Tobing**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Somalia is a state located at the Horn of Africa which is geographically strategic. Somalia Sea to the Gulf of Aden is an essential route used by foreign ships as international trade route. The emergence of Somali Piracy cases in international seas has become quite a threat for several years. Piracy has harmed European Union states and brought negative effect towards the global trade route. European Union, an international institution which concerns on global issue, made cooperation with Somalia. The purpose of this research was to know the motive behind European Union's involvement in Somalia. This research used explanative method with institutional liberalism perspective and collective security concept to explain this matter. The result of this research shows the involvement of the EU in Somalia departs from its fundamental principles where foreign policy takes four main forms which are Enlargement, Stabilization, Bilateralism and Interregionalism. This approach is based on active diplomacy, support for political change, increased security, development assistance and humanitarian assistance. A comprehensive approach in the Somali piracy case is determined by the fact that military missions in Somali waters are only a short-term solution and improvements in programs must be increased in order to get the expected impact. EU hopes to guarantee security on an ongoing basis by establishing maritime ship surveillance operations and maritime training on land. EU recognizes the interdependence of various global security challenges by linking security issues and highlighting the possibility of interaction between piracy threats.*

**Keywords:** *Somali Piracy, European Union, Common Foreign and Security Policy, European Union Comprehensive Approach.*

### **PENDAHULUAN**

Somalia diakui sebagai salah satu tantangan paling berbahaya bagi masyarakat internasional. Masalah negara ini diawali dari konflik kekerasan dan kegagalan dalam menyepakati struktur pemerintahan yang berkelanjutan. Selain bencana alam dan kelaparan tindakan korupsi dan kepemimpinan yang buruk oleh pemerintah Somalia menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Rata-rata penghasilan tahunan per-orang di bawah 600USD dan mengakibatkan masyarakat hidup dalam kemiskinan. Masyarakat beralih profesi menjadi perompak di wilayah perairan somalia hingga ke sepanjang Teluk Aden (Barry, 2009). Somalia menyediakan pusat kegiatan bagi teroris dan kejahatan terorganisir, dimana perompakan adalah aspek yang paling menonjol, karena tidak hanya membahayakan

pengiriman bantuan kemanusiaan tetapi juga menimbulkan risiko terhadap perdagangan maritim (Petretto, 2012).

Diperkirakan setiap tahunnya lebih dari 20.000 kapal menyeberangi Teluk Aden dengan total muatan harian mulai dari 4 juta minyak mentah pada tahun 2008 menjadi 3,2 juta barel pada tahun 2009. Teluk Aden merupakan bagian dari rute perdagangan yang sangat penting antara Asia dan Eropa dan pesisir timur Amerika Utara. Area ini penting untuk pengangkutan minyak mentah yang diproduksi oleh negara-negara Teluk Persia. Rute ini merupakan jalur terpendek dari Asia ke Eropa dan Amerika Utara (Wisniewski, 2011)

Peningkatan pesat dalam aktivitas pembajakan di lepas pantai Somalia terjadi sejak tahun 2006. Selama tahun 2006 hingga 2010, aktivitas pembajakan meningkat 86,2 persen di seluruh dunia, dengan jumlah serangan aktual dan percobaan penyerangan meningkat dari 239 di tahun 2006 menjadi 445 pada tahun 2010 (UNTDP, Maritime Piracy, 2014). Pada tahun 2008, perompak diperkirakan telah mendapatkan hasil sebanyak 30 juta USD dan 150 juta USD dari kegiatan perompakan. Sebanyak 12 kapal dan 263 pelaut ditangkap (Chalk, 2010)

Meningkatnya volume serangan dan tuntutan tebusan, mempengaruhi pelayaran komersial dan swasta, terutama di lepas pantai Somalia hingga samudera hindia (Barry 2009,p. 1). Perompak tersebut biasanya memilih titik-titik penting untuk beroperasi, di mana semua kapal harus lewat pada satu titik atau lainnya. Perompak ini bergabung bersama di bawah seorang pemimpin dan melakukan serangan terencana, menyita kapal dengan muatan berharga (termasuk tangki minyak dan militer) dan menahan sandera kru sampai permintaan tebusan mereka terpenuhi (Barry 2009,p. 1). Perompakan berbasis Somalia ditandai dengan memeras uang tebusan untuk kapal dan awak kapal.

Perompakan adalah isu yang kompleks yang hanya bisa diatasi dengan menggabungkan upaya politik dan diplomatik dengan tindakan militer dan hukum, bantuan pembangunan dan koordinasi internasional yang kuat (mschoa.org). Masalah pembajakan Somalia adalah endemik, dan tidak dapat diselesaikan melalui solusi jangka pendek. Diperlukan solusi jangka panjang untuk mengatasi akar penyebab masalah ini. (natoassociation.ca).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan keterlibatan Uni Eropa di Somalia terkait kasus perompakan pada tahun 2008-2015 Sikap Uni Eropa dalam keterlibatannya mengatasi perompakan oleh perompak Somalia akan dijelaskan dengan menggunakan teori Liberalisme Institusional. Teori ini akan mengkaji sikap Uni Eropa dalam intervensinya di Somalia dengan menggunakan asumsi dasar peran Institusi dalam kerjasama internasional. Menurut liberalisme institusional dalam pandangannya mengenai hubungan antar negara-negara, Integrasi dan kerjasama transnasional dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Kerjasama didalam suatu bidang atau permasalahan akan memperluas jangkauan dari kolaborasi antar negara.

Kemudian penelitian ini akan menjelaskan tentang sejarah kejatuhan pemerintah Somalia yang berdampak pada perekonomian negara dan struktur pemerintahan Somalia. Dari variabel-variabel permasalahan internal Somalia akan dihubungkan dengan penyebab munculnya perompak Somalia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Liberalis Institusionalisme dan Konsep Keamanan Kolektif*. Penulis selanjutnya akan menganalisa motif-motif Uni Eropa di Somalia melalui sudut pandang teori Liberalis Institusionalisme dan Konsep Keamanan Kolektif.

## **PEMBAHASAN**

### *Konflik dan Dampak Instabilitas Pemerintahan Somalia*

Pada abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20, negara-negara kolonialis membagi Somalia menjadi lima bagian. Inggris mengambil dua bagian sementara Italia, Ethiopia dan

Prancis masing-masing mengambil satu bagian. Berada dibawah kolonialisme, Somalia berjuang untuk mendapat kemerdekaannya. Somalia Utara dan Selatan masing-masing merdeka pada 26 Juni 1960 dan 01 Juli 1960 diikuti dengan terbentuknya Negara Somalia secara kesatuan. Dari tahun 1960 hingga tahun 1969, Somalia adalah negara demokratis serta terpilihnya presiden pertama Somalia yaitu Aden Abdule Osman Daar. Melalui kudeta yang terjadi pada tahun 1969, Presiden Osman Daar digantikan oleh Siyad Barre. Pada masa pemerintahannya, Barre menjalin hubungan dekat dengan Uni Soviet, yang memberikan bantuan kepada Somalia sepanjang tahun 1970-an (Venugopalan, 2017).

Konflik yang terjadi di Somalia dipicu oleh dukungan Soviet terhadap Ethiopia ketika Siad Barre berusaha untuk mengambil kembali wilayah Somalia Ogaden dari Ethiopia. Penyebab lain perang saudara yang terjadi di Somalia adalah warisan kolonial. Kekuatan-kekuatan Eropa sebelum Somalia terbentuk yang terdiri dari Inggris, Italia dan Prancis membagi lima bagian Somalia. Inggris mengambil dua bagian, Italia satu dan Prancis satu. Pemisahan Somalia secara permanen merusak rakyat Somalia. Sebagian besar sumber daya pemerintah Somalia yang lemah dan miskin digunakan untuk menyatukan kembali rakyat Somalia. Sementara perang saudara setelah pemerintah runtuh merugikan ekonomi dan menurunkan standar hidup masyarakat (Powell, 2006).

Bencana kemanusiaan yang terjadi di Somalia adalah salah satu dari bencana kemanusiaan terburuk di dunia ([www.odihpn.org](http://www.odihpn.org)). Setelah PBB menarik diri pada tahun 1995, pemerintahan Somalia masih mengalami permasalahan berupa konflik klan dan tidak ada kemajuan di negara ini (Powell, 2006). Pemerintah Somalia tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pendapatan domestik dan utang luar negeri dan sebagian besar menunggak yang diperkirakan sekitar 77% dari PDB ([cia.gov](http://cia.gov)).

Munculnya perompak Somalia dapat dijabarkan menjadi 2 jenis. Pertama, mereka yang dahulunya nelayan yang dipaksa untuk melindungi perairan dari penangkapan ikan ilegal dan pembuangan limbah. Meskipun serangan ini awalnya dimulai dari keputusan untuk menyelamatkan industri perikanan lokal, perompakan Somalia akhirnya tumbuh menjadi masalah internasional karena ikan di perairan mereka tidak hanya ditangkap secara berlebihan, tetapi juga tercemar oleh limbah berbahaya yang dibuang secara ilegal.

Kedua, perompak-perompak Somalia awalnya tidak pernah menjadi nelayan. Para Perompak lebih tertarik dengan keuntungan ilegal yang menguntungkan dari perompakan kapal yang telah membangun skala besar kegiatan kriminal yang secara aktif merusak pembangunan di Somalia. Hingga saat ini diperkirakan ada antara 1.500 dan 3.000 bajak laut yang beroperasi di lepas pantai Somalia ([publications.parliament.uk](http://publications.parliament.uk)).

Perairan Somalia di tanduk Afrika hingga ke Teluk Aden merupakan jalur strategis dalam perairan Internasional. Terdapat beberapa area yang dilacak memiliki aktivitas pembajakan tingkat tinggi. Daerah-daerah ini adalah Teluk Aden, dekat Somalia dan pintu masuk selatan ke Laut Merah, Teluk Guinea, dekat Nigeria dan delta Sungai Niger, Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, dan anak benua India, khususnya antara India dan Sri Lanka (Sullivan, 2010).

Karena merupakan salah satu rute perdagangan paling penting di dunia, ribuan kapal melewati Teluk menuju ke Terusan Suez atau sebaliknya setiap tahunnya. Namun Terdapat rute alternatif menuju Teluk Aden yaitu melalui *Cape of Good* (Tanjung Harapan). Rute ini secara geografis lebih panjang dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika kapal-kapal dagang berlayara melalui rute ini, secara signifikan akan meningkatkan biaya pengiriman. Dilaporkan bahwa terdapat penurunan lalu lintas pengiriman dan hilangnya pendapatan karena aktivitas ekonomi yang menurun maupun ancaman pembajakan di Teluk Aden.

Pada tahun 2000 hingga 2007 jumlah kasus perompakan yang terjadi di perairan Somalia kurang dari 100. Sementara terdapat lonjakan kasus pada tahun 2008 sebanyak 111 jumlah serangan dan 217 serangan pada tahun 2009. Pada tahun 2011 terdapat lonjakan 189

upaya serangan. Pada tahun 2012 secara keseluruhan jumlah pembajakan kapal turun menjadi 20 kasus sehingga mengalami pengurangan sebesar 28,5% dari 28 kasus pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terdapat pula penurunan dengan hanya 62 upaya serangan.

Pada tahun 2012, tingkat keberhasilan para perompak adalah sebesar 24%, naik secara signifikan dari jumlah 13% pada tahun 2011 dan turun sebanyak 27% dari tahun 2010. Pada tahun 2010 dan 2011, biaya tebusan hanya sekitar 2% dari total biaya pembajakan. Pada tahun 2010, 44 tebusan dibayarkan sejumlah \$238 juta, dengan rata-rata sekitar \$5,4 juta per tebusan. Pada tahun 2011, jumlah tebusan yang dibayarkan dikurangi menjadi 31 dan berjumlah \$159,62 juta. Pembayaran rata-rata tebusan turun menjadi \$4,97 juta. Sementara pada tahun 2012, jumlah dan nilai rata-rata tebusan mengalami penurunan yaitu kurang dari 1% dari total biaya.

Pada tahun 2013, Perompak Somalia hanya menyerang 23 kapal. Tidak ada kapal besar yang transit di wilayah tersebut yang berhasil diserang. Meskipun mengalami penurunan, menurut laporan Oceans Beyond Piracy, bahwa lalu lintas regional masih berisiko (One earth future foundation, 2013). Sementara dalam kategori penyanderaan, 171 pelaut ditahan oleh perompak Somalia pada tahun 2013. Namun tidak ada cedera atau kematian pelaut yang pasti terkait perompakan di lepas pantai Somalia pada tahun 2013.

Selama 2014 hanya ada dua serangan dikonfirmasi pada kapal yang transit di daerah berisiko tinggi (HRA) di Samudra Hindia. MV Nave Atropos diserang pada 17 Januari di selatan Salalah dan MV Andrea pada bulan februari (maritime-executive.com). Selama pada tahun 2015 tidak ditemukan kasus perompakan.

Disamping itu, terdapat sebanyak 27 kapal Uni Eropa yang mengalami penyerangan dan pembajakan mulai dari tahun 2008 hingga 2013. Jumlah serangan terbanyak terdapat pada tahun 2009 sebanyak 12 kapal dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Serangan dan pembajakan kapal anggota UE tidak ditemukan pada tahun 2014 dan 2015. Total kerugian yang tercatat pada kapal-kapal yang dibajak sebesar 26,3 juta Euro.

#### *Peranan Uni Eropa Dalam Stabilitas Keamanan Tingkat Global*

Uni Eropa terlibat dalam penanganan perompakan di Somalia. Keterlibatannya ditunjukkan melalui operasi-operasi yang dibentuk melalui seperangkat kebijakan *European External Action Service of European Union*. Peranan Uni Eropa dalam tingkat global didukung oleh John vogler yang menganggap Uni Eropa sebagai, "aktor kolektif". Para ahli lain mengusulkan konsep "Sistem Tindakan Eksternal Eropa". Sejak itu para ahli sepakat untuk mempertimbangkan Uni Eropa sebagai aktor dalam hubungan internasional (Richard, 2013). Menurut Marsh dan Mackenstein, Komunitas Uni Eropa muncul sebagai aktor keamanan internasional dengan membangun jaringan pada perjanjian ekonomi dan kemanusiaan dengan seluruh dunia (Marsh dan Mackenstein, 2005).

Tindakan Uni Eropa dalam membantu Somalia bukan hanya bertujuan untuk meredam tindakan perompakan saja namun diperluas dengan stabilitas Somalia sebagai negara gagal. Hal ini disesuaikan dalam mandat Uni Eropa tentang bantuan asing, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan didasarkan pada Perjanjian Lisbon. Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa menyediakan kerangka hukum untuk kebijakan pembangunan Uni Eropa. Secara khusus, pada pasal 208 dari Fungsi Uni Eropa tentang kerjasama dengan negara ketiga dan bantuan kemanusiaan menetapkan prinsi-prinsip pada kebijakan bantuan luar negeri yang harus dilakukan dan pencapaian tujuannya. Secara khusus pasal ini juga menetapkan bahwa Uni Eropa harus melaksanakan kebijakan pembangunan dalam kerangka kerja prinsip dan tujuan dari tindakan eksternalnya. Kerangka kerja prinsip tindakan eksternal yaitu kebijakan kerjasama pembangunan Uni Eropa harus memiliki tujuan utama pengurangan dan dalam jangka panjang dapat memberantas kemiskinan.

Uni Eropa menjadi sumber kekuatan baru sebagai *civilian power* melalui penyebaran instrumen normatif. Terdapat 4 alasan mengapa Uni Eropa memiliki kesempatan dalam

menyebarkan pengaruhnya dan layak disebut sebagai aktor penting. Pertama, Uni Eropa telah menyadari dan mengambil langkah efektif dalam mengatur hubungan antar negara-negara yang bersifat anarki (Howorth 2010). Kedua, Uni Eropa menerapkan sistem interdependensi kompleks yang terjalin secara struktural, saling terkait dalam kepentingan negara bangsa dan aktor lain dalam jaringan investasi, pertukaran, serta aliran global. Ketiga, Uni Eropa meyakini perluasan wilayah tidak akan memberikan hasil maksimal seperti pada kekerasan perang. Keempat, Uni Eropa menyadari bahwa perundingan multi-level merupakan komponen penting. Pandangan Uni Eropa telah mengalami transformasi di mana negara-negara yang gagal menjadi lebih mengkhawatirkan dari pada negara-negara kuat. Keamanan kolektif menjadi lebih relevan dari pada pertahanan teritorial. Hak asasi manusia menjadi sama pentingnya dengan hak-hak negara, di mana instrumen intervensi sipil menjadi sama pentingnya dengan instrumen militer (Howorth 2010).

#### *Common Foreign and Security Policy sebagai Pendekatan Sistematis Isu Perompakan*

*Common Security and Defense Policy* (CSDP) merupakan seperangkat tindakan yang berbasis pada konflik, pertahanan dan manajemen krisis. CSDP adalah bagian dari *Common Foreign Security Policy* (CFSP) (eas.europa.eu). Adapun kebijakan ini telah menjadi prinsip fundamental didalam Komisi Eropa dimana hubungan kebijakan luar negeri UE mengambil empat bentuk utama yaitu *Enlargement, Stabilization, Bilateralism* dan *Interregionalism*. Uni Eropa memainkan peran penting dalam diplomasi, promosi hak asasi manusia, perdagangan, pengembangan dan bantuan kemanusiaan dan bekerja dengan organisasi multilateral.

Dalam *European Security Strategy* disebutkan bahwa salah satu tantangan utama adalah kondisi negara yang rapuh. Hal ini kemudian mengidentifikasi perompakan sebagai dimensi baru kejahatan terorganisir. Stabilitas kawasan berakar pada kondisi politik dan sosial ekonomi Somalia. Solusi dalam kasus perompakan dapat ditekan melalui pengelolaan kawasan darat. (Petretto, 2012 p. 4). Hal ini mendukung pandangan internasionalisasi kebijakan. Uni Eropa menekankan pentingnya kerja sama antar daerah dan hubungan eksternalnya. Seperti yang diungkapkan Morgenthau dalam menerangkan pendekatan liberal yakni tentang dinamika keamanan internasional bahwa negara harus berusaha melihat masalah dari sudut pandang negara lain dan diplomasi harus berupaya untuk membuat semua negara sama-sama aman.

#### *European Union Comprehensive Approach dalam Penerapan Common Foreign and Security Policy*

*European Union Comprehensive Approach* adalah sebuah upaya peningkatan berbagai kebijakan, instrumen, dan tindakan Uni Eropa agar lebih koheren dan efektif yang diperlukan pada kondisi krisis dan konflik.

Perlunya pendekatan komprehensif dalam kasus pembajakan Somalia ditentukan oleh fakta bahwa misi militer di perairan Somalia hanyalah solusi jangka pendek. Suatu pendekatan komprehensif menawarkan prospek untuk menggunakan alat yang berbeda yang memberikan kemungkinan untuk memperbaiki penyebab masalah. Misi pelatihan dan misi pengembangan kapasitas dijelaskan sebagai solusi jangka panjang untuk masalah perompakan. Adapun program dari gagasan pendekatan komprehensif Uni Eropa antara lain EUNAVFOR Atalanta, EUCAP/EUCAP NESTOR dan EUTM. Ketiganya berungsi menjadi wadah Uni Eropa untuk menangani permasalahan perompakan di darat dan di laut.

Dalam mengatasi permasalahan terkait perompakan Somalia, seperangkat kebijakan Uni Eropa dalam *European Union Comprehensive Approach* dapat dijelaskan melalui pendekatan liberal institusionalisme. Bagaimana Uni Eropa menyatukan kebutuhan intrapersonal menjadi sebuah kebijakan kolektif. Menurut teori Liberalis Institusionalisme terdapat peran dasar Institusi dalam kerjasama internasional yakni: (1) Institusi internasional

menolong memajukan kerja sama di antara negara-negara melalui penyediaan informasi dan negosiasi antara negara-negara, (2) Institusi meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri, (3) Institusi menyediakan kesinambungan dan perasaan stabilitas, Institusi memajukan kerja sama di antara negara demi keuntungan timbal baliknya, (4) Institusi memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan Internasional. (Sorensen 2013).

Dengan demikian, bahwa di dunia yang dibatasi oleh kekuasaan negara dan kepentingan yang berbeda, lembaga-lembaga internasional yang beroperasi atas dasar timbal balik setidaknya akan menjadi komponen dari perdamaian. Institusi internasional sendiri kemungkinan tidak akan memberantas perang dan konflik dari sistem internasional, tetapi mereka dapat berperan dalam membantu mencapai kerja sama yang lebih besar antara negara-negara.

Pada praktiknya institusi membuat perbedaan signifikan dalam hubungannya dengan realitas kekuasaan. Lembaga-lembaga tersebut penting secara mandiri untuk mengendalikan pengaruh kekuasaan dan kepentingan. Institusi-institusi tersebut juga memiliki efek interaktif, yang berarti bahwa hasilnya bervariasi, tergantung pada sifat kekuasaan dan kepentingan. Institusi dapat memberikan informasi, mengurangi biaya transaksi, membuat komitmen lebih kredibel, menetapkan titik fokus untuk melakukan koordinasi, dan secara umum memfasilitasi operasi timbal balik. (Keohane 1995, p. 42)

Uni Eropa menunjukkan bahwa Institusi besar seperti dirinya mampu untuk melakukan kerjasama demi mencapai tujuan-tujuan yang kompleks. Dan melakukan tindakan efektif melalui pendekatan komprehensif. Uni Eropa diperlengkapi dengan baik untuk mengatasi tantangan perompakan mengingat beragamnya kebijakan dan instrumen. Uni Eropa secara mandiri mengendalikan seluruh kekuasaannya, menuangkan ide-ide dan menerapkan kebijakan-kebijakannya agar terciptanya perdamaian keamanan dan keuntungan baik dari segi ekonomi dan politik. Tujuannya terhadap Somalia agar dapat memberikan kemajuan dari segi domestik yang nantinya mempengaruhi kemampaan masyarakat untuk dapat bertahan hidup serta mengurangi angka kriminal dan konflik di negara ini.

#### *Faktor-Faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan Uni Eropa di Somalia*

Tingginya kasus perompakan yang terjadi di Somalia berdampak pada keamanan lepas pantai Somalia hingga perairan Tanduk Afrika. Perairan Somalia hingga ke Teluk Aden dan menjurus ke Samudera Hindia merupakan jalur penting yang dipergunakan kapal-kapal asing sebagai jalur perdagangan internasional. Berdasarkan analisis penulis menemukan beberapa faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan Uni Eropa di Somalia. **Pertama Melindungi Jalur Perdagangan Internasional**, dalam beberapa dekade terakhir, perusahaan pelayaran mulai memetakan dan menghindari titik-titik perompakan, sehingga membuat rute pengiriman lebih lama dan secara signifikan meningkatkan biaya transportasi. Penelitian pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa perompakan Somalia khususnya telah meningkatkan biaya pengiriman sebesar 8 hingga 12%, hanya dengan memaksa perusahaan pelayaran untuk mengambil rute yang lebih panjang yang tidak membuat mereka terkena serangan perompak ([www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)).

Lebih dari 80% perdagangan dunia dilakukan melalui transportasi laut dan sekitar 95% Perdagangan Uni Eropa diangkut melalui Laut dengan Teluk Aden menjadi salah satu rute arteri utama (European Union Center of North Caroline, 2011). Diperkirakan perompakan menelan biaya ekonomi global sekitar US \$24,5 miliar per tahun. Hal tersebut mencakup beragam luas biaya penting, seperti pembayaran tebusan, biaya asuransi, dan operasi militer. **Kedua, Biaya peralatan keamanan dan penjaga**, Pemilik kapal didorong untuk melakukan penilaian risiko penuh sebelum memasuki area berisiko tinggi. Langkah-langkah yang disarankan yakni: Menjaga dan Meningkatkan kewaspadaan, Kontrol Akses, Akomodasi dan

Ruang Mesin, Penyediaan *Water Spray and Foam Monitor*, Latihan Manuver, Pencahayaan Deck Atas, Citadels, Hambatan fisik seperti kawat silet dan penghalang listrik, Alarm, Proteksi Peralatan, Personel Keamanan Maritim Pribadi (One Earth Future Foundation, 2012).

Penggunaan penjaga bersenjata juga didukung oleh *International Maritime Organization* (IMO), *International Transport Workers' Federation*, dan beberapa perusahaan asuransi. Menurut *Independent Maritime Security Association*, penggunaan tim keamanan bersenjata swasta umumnya menelan biaya sekitar \$50.000 per transit (One Earth Future Foundation, 2011). Pertimbangan lain yang ikut berperan adalah jumlah pengawal yang sebenarnya dipekerjakan oleh pemilik kapal per transit. Tim keamanan setidaknya harus terdiri dari empat pengawal. Namun beberapa pemilik kapal telah mempekerjakan penjaga kapal yang lebih sedikit dengan tujuan mencapai penghematan biaya (One Earth Future Foundation, 2012).

**Ketiga**, *Biaya Re-Routing*, Taktik lain yang digunakan dari pemilik dan operator kapal untuk menghindari serangan bajak laut adalah rute ulang kapal melalui area beresiko tinggi (One Earth Future Foundation 2012). Menurut BIMCO pada tahun 2010 diperkirakan bahwa biaya terbesar dihasilkan dari kapal yang kembali untuk menghindari area berisiko tinggi yang dipengaruhi oleh perompak Somalia. Perusahaan-perusahaan pelayaran menghabiskan \$290,5 juta dollar untuk merutekan ulang di sepanjang Semenanjung Arab dan pantai India.

Kapal-kapal menghindari *High Risk Area* dengan transit di sekitar Tanjung Harapan dan memutuskan untuk tidak berlayar melalui Terusan Suez, ke Laut Merah, ke Teluk Aden dan area berisiko tinggi. Adapun kapal jenis Handysize, Afromas, Handymax dan Panamax mendapat tambahan biaya per setiap perjalanan. Jumlahnya tergantung dari kelas kapal yang digunakan. Perpindahan dari rute di sekitar Tanjung Harapan (Cape of Good Hope) telah berlangsung hingga tahun 2012.

Sejak tahun 2008 dalam keterlibatannya melindungi pengiriman dari Somalia, Uni Eropa secara khusus proaktif dalam memajukan kerja sama internasional. Uni Eropa membentuk sistem berbasis internet di mana kapal-kapal dapat mengajukan permohonan transit dan bantuan serta memiliki akses ke informasi ancaman terkini di Teluk Aden dan Samudera Hindia Barat. Pusat keamanan maritim Tanduk Afrika (MSCHOA) kemudian mengoordinasikan semua permintaan yang datang dari kapal komersial untuk mendapatkan bantuan dari CTF151, Uni Eropa dan NATO.

## KESIMPULAN

Penulis menemukan bahwa keterlibatan Uni Eropa dilatarbelakangi oleh komitmen Uni Eropa untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan oleh World Food Programme kemudian mengalami penyerangan oleh perompak Somalia. Pengamatan lebih lanjut menunjukkan adanya kerugian yang dialami kapal-kapal negara anggota Uni Eropa yang melewati jalur perairan Teluk Aden hingga ke Samudera Hindia. Perairan ini bersinggungan dengan Perairan Somalia di Tanduk Afrika. Tingginya aktivitas kapal-kapal di perairan strategis tersebut menyebabkan kerentanan dalam perdagangan internasional.

Keadaan yang tidak kondusif di Somalia menjadi pemicu utama maraknya kasus perompakan dan penyerangan kapal. Masyarakat Somalia mengalami kekurangan bahan pangan dan secara ekonomi tidak mumpuni. Hal ini menjadi sebuah alasan dasar mengapa meskipun dilakukan pengawasan dilaut, angka perompakan masih tetap tinggi. Faktor inilah yang juga melatarbelakangi Uni Eropa bersedia untuk memberikan bantuan domestik ke Somalia. Uni Eropa memiliki sebuah tanggung jawab moral yang tertulis dalam prinsip fundamentalnya yakni Uni Eropa memainkan peran penting dalam diplomasi, promosi hak asasi manusia, perdagangan, pengembangan, bantuan kemanusiaan dan keamanan global.

Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa program-program Uni Eropa di Somalia bukanlah satu-satunya cara yang sepenuhnya dapat memutus rantai perompakan. Hal tersebut

dikarenakan perompakan merupakan sebuah endemik yang bersifat kontinuitas maka dibutuhkan pula penanganan khusus dari pemerintah Somalia dan masyarakat itu sendiri.

## REFERENSI

- Hans-Georg, Petretto, K. (2012). *EU The Somalia challenge and Counter-Piracy: Towards a comprehensive approach*, Study for Greens/European Free Alliance.
- Jackson, R & Sørensen, G. (2013). *Introduction to International relations, fifth edition*, Oxford University Press Inc, New York.
- Barry, L, & Staver, B. (2009). *A study in maritime piracy*, Worcester Polytechnic Institute.
- Bellish, J. (2013). *The Economic Cost of Somali Piracy 2012: Working Paper*, Ocean Beyonds Piracy a program of One Future Foundation.
- Bowden, A & Basnet, S. (2011). *The Economic Cost of Somali Piracy: Ocean Beyonds Piracy*. Working Paper, One Future Foundation.
- Chalk, P. (2010). *Piracy off the Horn of Africa: Scope, Dimensions, Causes and Responses*. Vol XVI, pp. 93, Brown Jurnal of World Affairs.
- Howorth, J. (2010). *The EU as a Global Actor: Grand Strategy for a Global Grand Bargain*, Journal of Common Market Studies, vol. 48, no. 3, pp 459-466
- Keohane, R & Lisa L, Martin. (1995). *The Promise of Institutional Theory, International Security*, The MIT Press, vol. 20, no. 1, pp. 39-59.
- Powell, Benjamin et al. (2006). *Somalia After State Collapse: Chaos or Improvement*, The Independent Institute.
- Sullivan, Alex K. (2010). *Piracy in the Horn of Africa and Its Effect on the Global Supply Chain*, Springer Science+Business Media.
- UNCTAD. (2014). *Review of maritime transport: Report by UNCTAD Secretariat*. United Nations Publication.
- Venugopalan, H. (2017). *Somalia: A failed State*, Observer Research Foundation.
- Wisniewski, B & Siodmak, S. (2011). *Problem of sea route planning for a ship operating in piracy-threatened areas: the Indian Ocean*, Maritime University of Szczecin.
- Yann, R & Van H, Gilles. (2013). *The European Union as an Actor in International Relations*, L'Espece Geographique, vol. 42, pp. 15
- Bridger, J. (2011, Februari 5). *Somali Piracy and World's Response*. Diakses 25 Agustus 2017, dari Nato Association of Canada: <http://natoassociation.ca/somali-piracy-and-the-worlds-response/>
- Central Intelligence Agency. (2019). *The World Factbook-Economic Overview*. Diakses 13 Februari 2019, dari Central Intelligence Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html>
- EUCE. (2011, Juli). *Somalia: Piracy, Failed State Status, and The Impact on Global Trade*. Diakses 13 Februari 2019, dari European Union Center of North Carolina: [https://europe.unc.edu/files/2016/11/Brief\\_Somalia\\_Piracy\\_Global\\_Trade\\_2011.pdf](https://europe.unc.edu/files/2016/11/Brief_Somalia_Piracy_Global_Trade_2011.pdf)
- EU Missions and Operations. (2017, November 13). *As Part of EU's Common Security and Defence Policy (CSDP)*. Diakses 23 Maret 2019, dari European Union Missions and Operations: [https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csdp\\_missions\\_and\\_operations\\_factsheet.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csdp_missions_and_operations_factsheet.pdf)
- Holleman, C. (2008, October). *Conflic, Economic Crisis and Drought: a Humanitarian Emergency Out of Control*. Diakses 13 Februari 2019, dari Humanitarian Practice Network: <https://odihpn.org/magazine/conflict-economic-crisis-and-drought-a-humanitarian-emergency-out-of-control/>



Legrand, J. (2019, November). *Common Security and Defense Policy*. Diakses 18 Agustus 2019, dari European Parliament: <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/159/common-security-and-defence-policy>

UK Parliament Website. (2012, January 5). *Somali piracy: Who are the pirates and how do they operate?*. Diakses 15 Februari 2019, dari Parliament UK: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmcaff/1318/131806.htm>